



ISSN: 1412-3061

Edisi Nomor 03/Vol.1/2002

Tirta PELA

Monthly Newsletter

Media Informasi dan Komunikasi Pengelolaan Terpadu Sumberdaya Air, Pesisir dan Laut

Edisi ini:

3

Revisi**Sarjono Ka.Bagda Balikpapan**

"Pengelolaan pesisir dan laut harus dilakukan secara terpadu dengan melibatkan banyak stakeholder, baik dari kalangan pemerintah, dunia usaha maupun masyarakat."

4

Opini**Rencana Pengelolaan Teluk Balikpapan Perluukah?**

5

Cakupan**Konsultasi KTF Pasir dengan DPRD Kab. Pasir**

6

Ruang**Wilayah DAS Teluk Balikpapan**

7

Ruang**Perepat***(Gubernur dan Bupati)*

8

Ruang**Daftar Artikel**

8

*Kuis***Mendung di Proyek Pesisir Kaltim dengan berpulangnya Ary****Mak Aci:** Selamat Jalan, Ary. Doa kami besertamu*Beranda*

Rencana Pengelolaan Teluk Balikpapan

Suatu Contoh Perencanaan Pengelolaan Pesisir Terpadu

Pengelolaan Pesisir Terpadu (PPT) merupakan proses dinamis dan berkelanjutan untuk menyatukan unsur-unsur pemerintah, masyarakat, ilmuwan, dan para pengelola sumberdaya pesisir dan laut. Dalam mengembangkan PPT, proses perencanaan yang partisipatif dan ramah lingkungan merupakan salah satu bagian penting dalam mencapai tujuan-tujuan strategis yang diharapkan.

Pengelolaan Pesisir Terpadu (PPT) merupakan proses dinamis dan berkelanjutan untuk menyatukan unsur-unsur pemerintah, masyarakat, ilmuwan dan para pengelola sumberdaya pesisir dan laut. Dalam mengembangkan PPT, proses perencanaan yang partisipatif dan ramah lingkungan merupakan salah satu bagian yang penting untuk mencapai tujuan-tujuan strategis yang ingin dicapai.

ke hal 2 Rencana...

Pengantar Redaksi

Pembaca yang budiman,

Pengelolaan Pesisir Terpadu (PPT) merupakan konsep yang mulai diperkenalkan dalam dua edisi Tirta PELA sebelumnya. Di edisi ini, Tirta PELA menyajikan contoh dari PPT yang saat ini sedang diimplementasikan di Teluk Balikpapan. Dalam proses penyusunan Rencana Pengelolaan Teluk Balikpapan diupayakan keterlibatan pihak-pihak terkait yang berkepentingan untuk memberi masukan.

Tersaji pula dalam edisi ini, beberapa opini dari berbagai kalangan mengenai Rencana Pengelolaan Teluk Balikpapan. Opini-opini selanjutnya akan dapat anda simak pula di edisi April 2002 Tirta PELA. Cukilan pertemuan konsultasi Kabupaten Task Force Pasir atau lebih dikenal sebagai KTF Pasir dengan DPRD Pasir dapat anda simak. Demikian pula informasi mengenai Daerah Aliran Sungai (DAS) Teluk Balikpapan dan salah satu jenis tumbuhan mangrove yang dapat dijumpai di Teluk Balikpapan.



Sejak bulan Oktober 1998, paradigma baru dicoba untuk diterapkan bagi pembangunan atau pengelolaan wilayah pesisir dan laut Teluk Balikpapan. Proses ini diawali dengan menerapkan prinsip pendekatan ekosistem termasuk Daerah Aliran Sungai (DAS). Dengan demikian, perencanaan dan pengelolannya tidak hanya mencakup perairan laut dan pesisir pantai, melainkan juga mencakup daratan sekelilingnya yang merupakan DAS (watersheds) Teluk Balikpapan. DAS Teluk Balikpapan meliputi wilayah atas (upland) yang berpeluang memberikan dampak perubahan terhadap daerah di bawahnya yang meliputi pesisir dan perairan Teluk Balikpapan. Paradigma penting lainnya adalah proses perencanaan pengelolaan Teluk Balikpapan yang bersifat partisipatif (participatory planning process) dengan mengoptimalkan keterlibatan stakeholders atau berbagai pihak yang terkait dalam proses perencanaan atau pengelolannya.

Pendekatan ekosistem yang memadukan unsur lingkungan pesisir dan DAS dalam proses perencanaan pengelolaan partisipatif merupakan suatu rancangan yang penting untuk pengelolaan wilayah pesisir dan laut Teluk Balikpapan secara terpadu. Pendekatan dan proses ini diharapkan membentuk pengelolaan terpadu wilayah pesisir pantai dan DAS serta wilayah laut Teluk Balikpapan yang sesuai dengan situasi dan kondisi lokal melalui kemitraan berbagai pihak terkait.

Program rencana pengelolaan wilayah pesisir secara terpadu (PPT) dapat berupa perencanaan strategis (strategic planning), perencanaan zona pesisir (coastal zone planning), perencanaan pengelolaan (management planning), dan perencanaan aksi (action planning). Rencana program tersebut dapat diintegrasikan dalam skala lebih besar pada tingkat regional. Sebagai contoh, Pemerintah Propinsi Kalimantan Timur pada tahun 1999 telah menetapkan

Rencana Strategis (strategic plan) Pengelolaan Sumberdaya Pesisir dan Laut (produk dari MREP/Marine Resources and Evaluation Planning Project). Karena wilayah pesisir dan laut Teluk Balikpapan merupakan bagian dari Propinsi Kaltim, perencanaan strategis untuk kawasan teluk secara praktis tidak perlu dibuat, namun perencanaan pengelolaan dan perencanaan aksi tersebut harus tetap mengacu pada rencana strategis yang telah ada.

Perencanaan zona bagi wilayah pesisir dan perairan Teluk Balikpapan sebenarnya telah ditetapkan pemerintah daerah melalui kegiatan-kegiatan perencanaan tata ruang yang dilakukan masing-masing daerah mulai dari tingkat propinsi sampai tingkat kabupaten dan kota. Sebagai contoh, Kabupaten Paser dan Kota Balikpapan paling tidak telah dilakukan perencanaan zona pesisir dalam perencanaan tata ruang daerahnya masing-masing. Karena itu, wilayah pesisir pantai dan DAS serta laut Teluk Balikpapan juga memerlukan suatu perencanaan pengelolaan atau perencanaan aksi yang terpadu.

Sebagai bagian dari Program NRM-II (Natural Resources Management) melalui kerjasama USAID dan BAPPENAS, Proyek Pesisir Kaltim (CRMP/Coastal Resources Management Project) memfasilitasi pelaksanaan program PPT dan mempersiapkan dokumen Rencana Pengelolaan Teluk Balikpapan. Penerapan PPT tersebut diharapkan dapat dilaksanakan secara berkelanjutan melalui proses perencanaan partisipatif bersama pihak-pihak terkait, sebagai upaya penguatan dan desentralisasi pengelolaan sumberdaya wilayah pesisir di Kalimantan Timur. Pada periode implementasinya (1998 - 2003), tujuan kegiatan fasilitasi adalah mengupayakan suatu perencanaan pengelolaan wilayah pesisir dan laut Teluk Balikpapan (perairan laut dan DAS Teluk Balikpapan).

Perencanaan penanganan isu yang ada tersebut telah memperoleh prioritas dan rekomendasi dari seluruh pihak yang berkepentingan.

Selama kurang lebih 18 bulan sejak dimulainya kegiatan (Oktober 1998), Proyek Pesisir Kaltim telah memfasilitasi pelaksanaan identifikasi dan analisis isu serta permasalahan pengelolaan sumberdaya pesisir dan laut Teluk Balikpapan. Proses ini dilakukan bersama perwakilan stakeholders dari kalangan pemerintah, LSM dan universitas. Berbagai analisis dilakukan melalui sejumlah studi yang intensif. Dua lokakarya partisipatif digelar pada bulan Januari dan Oktober 1999 untuk mengkaji dan memberi prioritas terhadap isu-isu pengelolaan hasil identifikasi dan analisis yang telah dilakukan. Muncul pertanyaan, ke mana sebaiknya isu-isu pengelolaan hasil prioritas tersebut dituangkan sebagai pedoman bagi kegiatan penanganan? Selama ini, Rencana Tata Ruang (RTR) merupakan perangkat yang telah ada dan tengah dijalankan. RTR lebih merupakan perangkat rencana pengalokasian sejumlah sumberdaya, terutama sumberdaya ruang, untuk sejumlah kegiatan yang telah ditetapkan. Perangkat RTR dengan durasi implementasi 10 tahun atau yang tidak pernah di-review atau direvisi takkan mampu mengantisipasi isu dan permasalahan aktual yang muncul.

Di sinilah perlu adanya sebuah perangkat rencana pengelolaan (management plan) untuk mengantisipasi permasalahan yang muncul dalam pengelolaan Teluk Balikpapan. Rencana Pengelolaan Teluk Balikpapan merupakan perangkat yang mencoba mengantisipasi permasalahan di kawasan Teluk Balikpapan termasuk wilayah DAS-nya, melalui pendekatan ekosistem. Perangkat ini dapat menjadi alat koordinasi dan integrasi, juga sebagai media berbagi peran dan tanggung jawab berbagai pihak yang terkait dalam pengelolaan ekosistem Teluk Balikpapan dan wilayah DAS-nya secara lebih baik. (asd) ■

Sarjono,

Ketua BAPPEDA Kota Balikpapan

"Pengelolaan pesisir dan laut harus dilakukan secara terpadu dengan melibatkan banyak stakeholder, baik dari kalangan pemerintah, dunia usaha maupun masyarakat."



Dalam keseharian, pria yang akrab dipanggil Pak Jono ini terlihat sangat familiar dan ramah. Hal ini tidak salah karena beliau dibesarkan dalam keluarga yang taat beragama. Ini dibuktikan dengan keaktifan beliau dalam kegiatan keagamaan, pondok pesantren dan organisasi-organisasi keagamaan hingga sekarang. Bapak dengan tiga orang anak hasil pernikahannya dengan Widiastuty, ini lahir 48 tahun yang lalu, tepatnya tanggal 9 April 1954 di Ibukota Jawa Tengah, Semarang. Sarjono mengawali pendidikan Sekolah Dasar di Semarang, kemudian dilanjutkan di Sekolah Teknik Negeri IV jurusan Listrik di kota yang sama. Ia hijrah ke Kota Balikpapan mengikuti kepindahan pamannya dan melanjutkan ke Sekolah Menengah Atas (SMA) Sinar Pancasila. Pendidikan Perguruan Tinggi ditempuhnya pada tahun 1976 di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) jurusan Sosiologi Universitas Mulawarman. Gelar sarjana berhasil diraihinya pada tahun 1981. Semasa di perguruan tinggi, pria yang mempunyai semboyan "Hidup sederhana dan berguna bagi bangsa, agama, dan negara" ini aktif di berbagai kegiatan kemahasiswaan. Bahkan ia pernah menjabat sebagai Wakil Ketua Senat Mahasiswa FISIP Unmul.

Sejak masih di bangku SMA pada tahun 1975, Sarjono sudah mulai bekerja di Sekretariat KORPRI Balikpapan. Empat tahun kemudian ia dipindah ke bagian hukum Pemerintah Kota (Pemkot) Balikpapan dan diangkat sebagai pegawai negeri sipil (PNS). Pada awal bekerja sebagai PNS ia banyak berkecimpung di masyarakat lingkungan desa dan kelurahan. Tahun 1990 ia dimutasikan ke BAPPEDA Kota Balikpapan sebagai Kepala Bidang Statistik dan Pelaporan. Di Sekretariat Daerah Balikpapan, ia pernah menjabat sebagai Asisten II Administrasi Pembangunan. Kemudian mulai tahun 1999 hingga sekarang ia dipercaya untuk memimpin BAPPEDA Kota Balikpapan. "Pengelolaan pesisir dan laut harus dilakukan secara terpadu dengan melibatkan banyak stakeholder, baik dari kalangan pemerintah, dunia usaha maupun masyarakat", ujarnya suatu ketika. Walaupun pada kenyataannya, selama ini belum adanya koordinasi kegiatan antar stakeholder, artinya visi dan misi pengelolaan pesisir belum satu bahasa, ia menambahkan.

Di samping itu, kesamaan visi dan keterpaduan program juga merupakan hal yang penting dalam pengelolaan pesisir, ungkap Sarjono saat ditemui di ruang kerjanya. Menurutnya, dengan mengembangkan satu isu bahwa keberadaan pesisir dan laut adalah kepentingan bersama, diharapkan tercipta pengelolaan wilayah pesisir secara terpadu.

Ia berpandangan bahwa potensi pesisir dan laut Kota Balikpapan cukup besar, baik potensi perikanan, ekowisata maupun daerah pemanfaatan produktif masyarakat. Oleh karena itu diperlukan rencana strategis yang melibatkan semua pihak, sehingga dapat diketahui apa yang dilakukan masyarakat, pemerintah dan lembaga swadaya masyarakat (LSM).

Menurut Sarjono, pengembangan sumberdaya manusia yang memiliki keahlian di bidang pesisir dan kelautan sangat perlu ditingkatkan mengingat potensi yang cukup menjanjikan dari sektor ini. Terutama sumberdaya manusia yang secara langsung berkecimpung dengan aktivitas ekonomi atau sosial di wilayah pesisir dan laut. Untuk itu sejak tahun 2001, Pemkot Balikpapan mulai merekrut tenaga ahli bidang teknik kelautan guna mengantisipasi kerjasama dengan pihak lain dalam rangka pengelolaan wilayah pesisir dan kawasan laut.

"Permasalahan kawasan pesisir dan laut sudah sangat mendesak", ujarnya. Dengan melihat aktivitas yang dilakukan masyarakat, industri dan kegiatan sosial ekonomi secara langsung dapat memberikan tekanan pada wilayah pesisir dan dapat berakibat terjadinya degradasi kualitas lingkungan. Ditambah lagi dengan penegakan hukum yang kurang terhadap pihak-pihak yang mencemari dan merusak lingkungan.

Ketua Bappeda ini berharap dokumen Rencana Pengelolaan Teluk Balikpapan nantinya dapat memberikan alternatif pemecahan masalah-masalah yang sekarang dihadapi dalam proses pengelolaan wilayah pesisir. Dokumen ini diharapkan dapat diaplikasi dan diimplementasi serta sesuai dengan keinginan masyarakat. Searah dengan visi dan misi Pemkot Balikpapan untuk menciptakan kawasan pesisir dan laut yang lestari, sehingga dapat dinikmati secara berkelanjutan dan mempunyai nilai tambah bagi masyarakat. "Rencana pengelolaan ini memerlukan waktu yang panjang dan komitmen dari seluruh stakeholder yang terlibat dan tidak bisa dilakukan secara sektoral" ujarnya mengakhiri pembicaraan. (chp) ■

Rencana Pengelolaan Teluk Balikpapan Perlukah?

Adanya suatu perencanaan dalam upaya pengelolaan memang mutlak diperlukan. Demikian pula dalam rangka implementasi rencana pengelolaan kawasan Teluk Balikpapan oleh berbagai pihak. Redaksi menggali pendapat beberapa pihak-pihak yang terkait dalam upaya penyusunan Rencana Pengelolaan Teluk Balikpapan. Apa kata mereka?



Sebagai lembaga legislatif kami akan selalu mendukung upaya perencanaan pengelolaan Teluk Balikpapan. Demikian juga dengan upaya pembuatan Perda di kawasan Teluk Balikpapan. Kami berharap dan yakin apabila ini terus dikembangkan akan berujung kemantapan dan keberuntungan bagi masyarakat Kabupaten Pasir dan Kota Balikpapan. **(Abu Bakar, KETUA KOMISI A DPRD KABUPATEN PASIR)**



Pada dasarnya saya mendukung adanya Rencana Pengelolaan Teluk Balikpapan, sepanjang hal itu baik untuk keberadaan Teluk Balikpapan sendiri, khususnya rencana pembangunan ekowisata di Teluk Balikpapan. Hal ini akan berdampak positif bagi perkembangan tempat hiburan di kota Balikpapan yang bernaung alam dan lingkungan. **(Dedy Suharno, MAHASISWA FAKULTAS KEHUTANAN UNIVERSITAS)**

Dalam upaya rencana pengelolaan kawasan Teluk Balikpapan, hal penting adalah landasan hukum yang kuat yang diwujudkan dalam bentuk Perda, sehingga kewenangan dan aturannya jelas. Siapa yang melanggar pasti akan dikenai sanksi, karena aturannya sudah pasti. Selain itu dalam pengelolaan Teluk Balikpapan, tidak berarti semua kawasan harus hijau, namun bagaimana menempatkan sesuatu secara proporsional sesuai dengan tempatnya. Kalau memang cocok untuk areal pertambakan, kenapa tidak? **(M. Nainggolan, BPN KOTA BALIKPAPAN)**



Dukungan dari berbagai pihak yang mempunyai komitmen dan kemampuan harus selalu dikukuhkan dalam proses pembuatan rencana pengelolaan, sehingga akan menjadi kerangka kerja pada proses perencanaan ke depan. Yang terpenting adalah harus adanya rencana aksi (action plan) di lapangan. **(Prof. Dr. Wawan Kustiawan, DEKAN FAKULTAS KEHUTANAN UNIVERSITAS MULAWARMAN, SAMARINDA)**



Kami sebenarnya sangat setuju sekali dengan adanya rencana pengelolaan pada kawasan Teluk Balikpapan sepanjang hal tersebut tidak berdampak negatif bagi lingkungan dan rencana ini tentunya akan menguntungkan bagi masyarakat, baik sisi ekonomi maupun keindahannya. **(Saka, TOKOH MASYARAKAT KAMPUNG BARU TANJUNG JUMLAH, KABUPATEN PASIR)**



Bagian penting dalam proses pembuatan dokumen Rencana Pengelolaan Teluk Balikpapan adalah pelibatan stakeholder dan shareholder yang tidak mempunyai konflik kepentingan untuk duduk bersama memikirkan kawasan teluk. Kemudian bagaimana upaya memunculkan kesadaran pada masyarakat pesisir untuk peduli dan menjaga kelestarian lingkungan kawasan Teluk Balikpapan dari ancaman kerusakan. Kalau semua sudah sadar, tidak perlu ada Perda. **(Satria Djaya, MANAGER COMMUNICATION & AREA GOVERNMENT RELATIONS, UNOCAL INDONESIA COMPANY)**

Secara fungsional kawasan Teluk Balikpapan sangat penting sekali, baik sebagai objek pariwisata, jalur perhubungan, perikanan dan lalu lintas. Oleh karena itu, harapan ke depan adalah adanya perhatian yang harus lebih terencana dalam pengelolannya. **(Eko Purwito, BAPEDALDA KABUPATEN PASIR)**



Keterlibatan semua pihak dalam proses pembuatan dokumen Rencana Pengelolaan Teluk Balikpapan adalah mutlak diperlukan, agar semua kepentingan dapat terakomodasi dengan baik dan tentunya demi legalitas dokumen tersebut secara sosial. Apabila dilihat dari segi sosial dan strategi pembangunan, Teluk Balikpapan merupakan kawasan yang vital bagi pengembangan perekonomian, wisata bahari dan industri. **(Slamet Junaidi, DINAS PARIWISATA KOTA BALIKPAPAN)**



Konsultasi KTF Pasir dengan DPRD Kabupaten Pasir



Pada bulan Juni 2000, Pemerintah Kabupaten Pasir telah membentuk suatu satuan tugas yaitu Kabupaten Task Force (KTF) Pasir. Pembentukan KTF Pasir ini berdasarkan pada Surat Keputusan (SK) Bupati Pasir No. 445/2000. Berdasarkan SK Bupati tersebut, KTF Pasir bertugas mempersiapkan dan melakukan segala sesuatu yang berhubungan dengan kegiatan Proyek Perencanaan Pengelolaan Sumberdaya Pesisir Kabupaten Pasir. Anggota yang tergabung dalam satuan tugas yang bersekretariat di Bappeda Pasir ini adalah ketua atau kepala dari beberapa instansi yang terkait dalam pengelolaan wilayah pesisir dan laut di Kabupaten Pasir. Instansi yang terlibat dalam KTF tersebut antara lain Bappeda, Bapedalda, Dinas Perikanan dan Kelautan, Dinas Kehutanan dan Badan Pertanahan Nasional serta Kecamatan Penajam dan Sepaku.

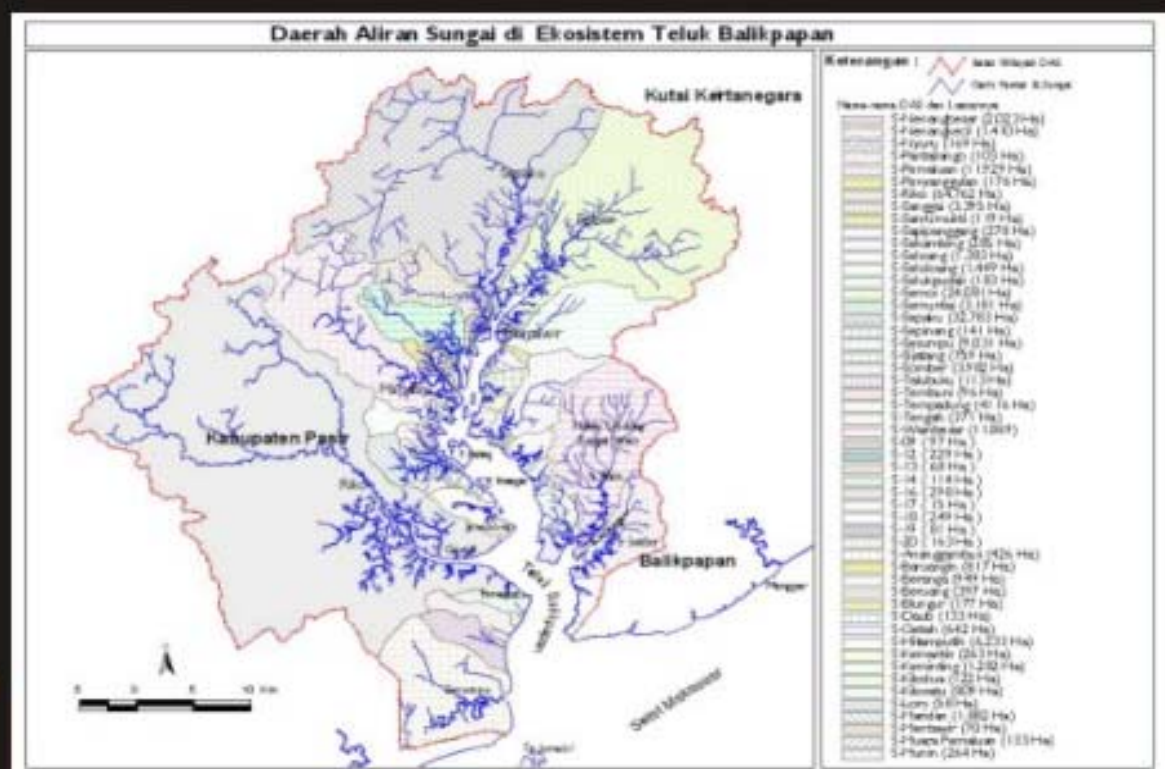
Saat ini Rencana Pengelolaan Teluk Balikpapan sudah memasuki tahap produksi dan adopsi formal serta pendanaan bagi strategi implementasi, program-program, dan aksi pengelolaan pesisir terpadu. Sehubungan dengan hal tersebut, maka Proyek Pesisir Kaltim memfasilitasi pelaksanaan pertemuan konsultasi KTF Pasir dengan DPRD Kabupaten Pasir di Balikpapan. Pertemuan yang diselenggarakan pada tanggal 30-31 Januari 2002 ini bertujuan untuk mengkonsultasikan berbagai aspek hukum dan kebijakan dalam rencana pengelolaan wilayah pesisir secara terpadu. Pertemuan yang dilaksanakan di Hotel Benakutai ini, selain dihadiri oleh anggota Komisi A DPRD Kabupaten Pasir dan KTF Pasir, juga melibatkan Kota Task Force (KTF) Balikpapan, perwakilan Kelompok Kerja Erosi-Sedimentasi dan Pengelolaan Tambak-Mangrove serta media cetak lokal dan nasional. Pertemuan ini diharapkan bisa menyelaraskan visi dan misi perencanaan dan implementasi serta dukungan secara hukum demi legalitas rencana pengelolaan kawasan pesisir dan laut, khususnya pengelolaan di Teluk Balikpapan.

Diskusi anggota KTF Pasir-Balikpapan dengan perwakilan dari Kelompok Kerja Erosi-Sedimentasi dan Kelompok Kerja Pengelolaan Tambak-Mangrove mengawali acara pertemuan di hari pertama. Pertemuan ini dipersiapkan untuk pembekalan dan pengayaan materi sebagai bahan masukan anggota KTF sebelum acara konsultasi dengan DPRD Pasir. Pertemuan ini juga membahas kinerja KTF Pasir selama ini maupun laporan Kelompok Kerja Erosi-Sedimentasi dan Pengelolaan Tambak-Mangrove mengenai kondisi kawasan Teluk Balikpapan. Terungkap pula dukungan KTF Pasir atas upaya-upaya yang telah dilakukan kedua kelompok kerja yang peduli akan isu erosi-sedimentasi dan mangrove di Teluk Balikpapan tersebut, terutama yang berkaitan dengan teknis di lapangan. KTF Pasir mengharapkan agar kedua kelompok kerja tersebut dapat mengembangkan adanya kelompok kerja lain yang sesuai dengan isu-isu pengelolaan seperti rehabilitasi, polusi perairan maupun sistem informasi geografi (SIG).

Pertemuan awal tersebut menghasilkan beberapa rekomendasi, antara lain : (1) usulan mengenai Rencana Umum Tata Ruang Kota/Kabupaten, baik tentang perbatasan wilayah administrasi maupun yang spesifik ke kawasan pesisir, (2) Perda mengenai pengelolaan pesisir dan laut yang akan memantau dan menata penggunaan lahan di kawasan teluk, sehingga tidak terjadi tumpang tindih pemanfaatan ruang, baik instansi pemerintah, swasta maupun masyarakat setempat, (3) Adanya AMDAL maupun UKL/UPL (Upaya Pengelolaan Lingkungan/Upaya Pemantauan Lingkungan) mengenai baku mutu lokal untuk pembangunan.

Hari kedua pertemuan (31 Januari 2002) merupakan momen penting. Sebelum diskusi dengan DPRD Kabupaten Pasir, beberapa presentasi disajikan antara lain oleh Proyek Pesisir Kaltim yang memaparkan Sosialisasi Rencana Pengelolaan Teluk Balikpapan dan Rikardo Simarmata, SH, yang mempresentasikan makalah berjudul Informasi Contoh Pengembangan Perda Sumberdaya Alam, Lingkungan Hidup serta Pengelolaan Pesisir dan Laut dalam Konteks Desentralisasi dan Otonomi Daerah.

Diskusi menghasilkan beberapa hal penting sebagai rekomendasi, antara lain perlu adanya Perda pengelolaan mangrove termasuk pengelolaan tambak, sosialisasi sempadan sungai, dan rehabilitasi lahan kritis di DAS Teluk Balikpapan. Dikemukakan pula usulan untuk mengadakan Konferensi Tingkat Tinggi antara Bupati Pasir, Walikota Balikpapan, dan Gubernur Kaltim berkaitan dengan Perda perbatasan wilayah dan pengelolaan pesisir, sehingga bisa tercipta suatu kesepakatan kerjasama. (ak/chp/ew)



Wilayah **DAS** Teluk Balikpapan

Untuk memahami wilayah Daerah Aliran Sungai (DAS) Teluk Balikpapan, kita dapat mengamati mulai dari bagian-bagian yang merupakan bentuk perbukitan. Jalur punggung bukit ini memperlihatkan sisi lereng yang cukup curam hingga terjal di bagian atas atau daratan. Semakin ke arah pesisir pantai, kita akan melihat bentuk pola aliran-aliran sungai yang menuju ke arah muara. Segala bentuk kegiatan reklamasi lahan yang ada di bagian atas/daratan hingga ke pesisir akan mempengaruhi kondisi perairannya. Terjadinya erosi di bagian daratan dapat mengakibatkan pendangkalan atau sedimentasi di muara sungai. Menurunnya kualitas air ini dapat mengganggu kehidupan biota perairan yang ada di dalamnya. Selain itu, DAS dapat dijadikan acuan sebagai batas alam terhadap pembagian daerah administrasi (*natural borders or landmarks*).

Wilayah DAS Teluk Balikpapan memiliki luas kurang lebih 190.083 ha. Di bagian timur dan tenggara wilayah DAS teluk ini merupakan bagian daerah administrasi Kota Balikpapan (20.909 ha atau 11% dari kawasan). Kawasan ini mencakup 4 kecamatan yaitu Balikpapan Barat, Utara, Selatan dan Tengah. Kelurahan yang masuk dalam Kecamatan Balikpapan Barat adalah Karangau, Margo Mulyo, Baru Ulu, Baru Tengah, Baru Ilir, dan Marga Sari. Kemudian wilayah Kecamatan Balikpapan Utara meliputi Kelurahan Batu Ampar, Karang Joang, dan Muara Rapak. Sedangkan Kecamatan Balikpapan Selatan dengan satu kelurahan yaitu Prapatan. Demikian juga dengan Kecamatan Balikpapan Tengah yaitu Kelurahan Karang Jati.

Di bagian ujung timur laut wilayah DAS Teluk Balikpapan merupakan bagian dari wilayah administrasi Kabupaten Kutai Kartanegara dengan luas 3.802 ha atau sekitar 2% dari kawasan DAS Teluk Balikpapan.

Cakupan terluas dari DAS Teluk Balikpapan merupakan kawasan yang termasuk dalam wilayah administrasi Kabupaten Pasir.

Kabupaten ini menempati 87% dari keseluruhan DAS teluk Balikpapan atau sekitar 165.372 hektar. DAS Teluk Balikpapan di Kabupaten ini hanya mencakup 2 kecamatan yaitu Sepaku dan Penajam. Walaupun demikian, masing-masing kecamatan memiliki banyak kelurahan. Di kecamatan Sepaku mencakup 12 kelurahan yaitu Maridan, Pemaluan, Mientawir, Sepaku, Sepaku I, Sepaku II, Sepaku III, Sepaku IV, Semoi I, Semoi II, Semoi III dan Semoi IV. Kemudian Kecamatan Penajam dengan meliputi 19 kelurahan yaitu Penajam, Gn.Steleng, Nenang, Nipah-Nipah, Sungai Parit, Laweh-Laweh, Sesumpu, Kampung Baru, Giri Mukti, Buluminung, Sotek, Sepan, Riko, Gersik, Jenebora, Pantai lango, Seloloang, Pejala, dan Petung.

Secara keseluruhan, ada sekitar 45.000 kepala keluarga atau 175.000 jiwa semuanya tersebar di 42 kelurahan - menghuni wilayah DAS teluk yang berhadapan dengan Selat Makassar ini.

Di wilayah DAS Teluk Balikpapan dijumpai 52 sub DAS. Sub DAS merupakan bagian dari Daerah Aliran Sungai utama. Di wilayah administrasi Kota Balikpapan terdapat 9 sub DAS. Sub DAS Wain Besar adalah yang terbesar dengan luas 11.082 hektar dan yang terkecil adalah DAS Sanru Mukti dengan luas 286 hektar. Di wilayah Kabupaten Pasir terdapat 43 sub DAS, dengan DAS Riko yang terbesar seluas 64.751 ha dan yang termasuk kelompok kecil adalah DAS Mientawir seluas 70 ha.

Tatanan bentuk muka bumi dan proses yang ada di dalamnya merupakan hal yang penting untuk dikemukakan dalam isu spesifik pengelolaan Teluk Balikpapan. Hal ini penting dalam menentukan pengelolaan tata ruang dan pemanfaatannya. Proses geomorfologis (perubahan secara rinci bentuk muka bumi) sesungguhnya dapat menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan, bahkan bisa memunculkan dampak sosial seperti potensi konflik dan penyerobotan lahan. (rmi)

Perepat

(*Sonneratia alba*, Smith)

Ragam-
Jahukah Anda?

b



Nama Daerah

Perepat, pedada, pidada, rambai laut, bogem, laut kinder, kapadat beropak, bidada, posi-posi, wahat, putih, beropak, bangka, susup, kedada, muntu, sopo, barapak, pupat, mange-mange (Indonesia), pagatpat (Filipina), pedada (Serawak).

Sistematika :

Divisi : Spermatophyta
Kelas : Angiospermae
Sub Kelas : Dicotyledoneae
Bangsa : Myrtiflorae
Suku : Sonneratiaceae
Marga : Sonneratia
Jenis : alba



Deskripsi Umum

Pohon selalu hijau, tumbuh tersebar, ketinggian kadang-kadang hingga 15 m. Kulit kayu berwarna putih tua hingga coklat, dengan celah longitudinal yang halus. Akar berbentuk kabel di bawah tanah dan muncul ke permukaan sebagai akar nafas yang berbentuk kerucut tumpul dan tingginya mencapai 25 cm.

Ciri-Ciri Perepat (*Sonneratia alba*)

a. Habitus

Pohon kecil, medium sampai besar hingga diameter batang lebih dari satu meter pada ketinggian dada. Jenis pionir tidak toleran terhadap air tawar dalam periode lama. Umumnya tumbuh di tanah yang bercampur lumpur dan pasir, kadang-kadang pada daerah baruan dan karang berlumpur. Sering ditemukan pada daerah pantai yang terlindung dari hempasan gelombang, muara sungai dan pulau-pulau lepas pantai. Pembungaan terjadi sepanjang tahun. Bunga berkembang lama dan mengembang penuh di malam hari. Penyerbukan oleh ngengat, kunang-kunang yang menempel pada pohon ini pada malam hari, burung dan kelelawar memakan buah. Buah mengapung karena adanya jaringan yang mengandung air pada bijinya. Memiliki akar napas, akar lutut dan bentuk tajuk *Sonneratia* spp. bulat, bentuk payung lebar.

b. Batang dan cabang

Kulit batang berwarna abu-abu tua, licin atau burik, pecah-pecah halus, agak tipis, percabangan tinggi dan rendah dengan bagian batang yang bebas cabangnya lebih dari 15 m.

c. Daun

Daun berhadapan, bertangkai, tunggal, tepi rata, serupa kulit, ujung membulat, bentuk bulat seperti telur terbalik. Daun penumpu tidak ada, kelopak berdaun lebat dengan 4-8 tajuk, runcing dalam kuncup bersambung seperti katup serupa kulit, memiliki kelenjar yang tidak berkembang pada bagian pangkal ganggang daun. Ukuran 5-12,5 x 3-9 cm.

d. Bunga dan Buah

Bunga soliter, mahkota dan benang sari berwarna putih berjumlah banyak, kelopak berwarna hijau di bagian luar dan kemerahan di bagian dalam. Ukuran bunga besar, sepal bersatu membentuk cup terdiri dari 48 tidak saling overlapping, petal tidak ada atau selaras dengan jumlah sepal. Stamen terdiri dari 12 atau umumnya banyak. Buah memiliki banyak biji (150-200 biji) dan tidak akan membuka pada saat telah matang, buah berkayu, bentuk kapsul dengan diameter 3,5-4,5 cm, rasa asam dan dapat dimakan.



Penyebaran

Chapman (1976) menerangkan bahwa *Sonneratia* spp. terdapat di daerah tepi-tepi muara sungai dan tepi laut yang secara teratur tergenang air laut di waktu pasang serta terdapat pada tanah lumpur dalam yang banyak mengandung bahan organik yang tinggi. Tersebar luas di Afrika, Madagaskar, India, Sri Lanka, Burma, Malaysia, Indonesia, Filipina, New Guinea dan Kepulauan Pasific. Jenis marga ini yang dapat kita jumpai di seluruh wilayah Indonesia adalah *Sonneratia alba*, *Sonneratia caseolaris* dan *Sonneratia ovata*.



Kegunaan Kayu

Di Sulawesi, kayu dibuat untuk perahu dan bahan bangunan atau sebagai bahan bakar ketika tidak ada bahan bakar lain. Akar nafas digunakan oleh penduduk Papua untuk gabus dan pelampung.



Ragam Daftar Istilah

- **Daerah Aliran Sungai (DAS)** adalah bagian daratan yang dibatasi oleh jalur punggung (jajaran tanggul alam, puncak-puncak bukit atau gunung). Pada saat air hujan jatuh di dalam cakupan DAS, sebagian masuk ke dalam tanah (air bawah tanah), sebagian mengalir di permukaan sebagai aliran permukaan (*run-off*) dan sebagian lagi masuk ke aliran-aliran sungai yang ada. Kemudian air bawah tanah, aliran permukaan maupun sungai-sungai, mengalir dan bermuara di sebuah bentang perairan yang bisa merupakan sebuah aliran sungai besar, danau, teluk dan laut lepas atau samudera.
- **Ekosistem DAS** adalah suatu sistem ekologi yang terdiri dari komponen biotis dan abiotis yang saling berinteraksi sehingga membentuk suatu kesatuan dalam DAS.
- **Pengelolaan DAS** adalah kegiatan perencanaan, penggunaan, pengaturan dan perlakuan sumberdaya hutan, tanah dan air di suatu DAS untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu.
- **DAS Teluk Balikpapan** adalah bagian dari massa daratan utama Pulau Kalimantan yang terletak di wilayah daratan bagian tenggara Propinsi Kalimantan Timur, yang aliran-aliran sungainya mengalir ke dan bermuara di wilayah perairan laut Teluk Balikpapan. Wilayah DAS Teluk Balikpapan merupakan daratan yang luasnya mencapai 190.083 ha. Wilayah DAS Teluk Balikpapan yang sebagian besar berada di daerah administrasi Kabupaten Pasir dan Kota Balikpapan.

Kuis

Proses perencanaan yang melibatkan banyak pihak yang berkepentingan disebut :

- a. Perencanaan Terarah
- b. Perencanaan Persuasif
- c. Perencanaan Partisipatif

Pilih salah satu jawaban yang paling benar.

Kirimkan jawaban melalui pos, fax maupun email dengan mencantumkan identitas dan alamat lengkap ke alamat :

Redaksi Tirta PELA

Jl. R.E. Martadinata No.3 RT.28 RW.10 Mekarsari

Balikpapan 76121, Kalimantan Timur

Fax. 0542-731858

Email : tirtapela@yahoo.com

Jawaban diterima selambatnya tanggal 25 April 2002

Lima pemenang diumumkan pada edisi Mei 2002 dan akan mendapatkan hadiah menarik dari redaksi.

Jawaban kuis Edisi I Januari 2002 adalah **(b) Pengelolaan Pesisir Terpadu.**

Selamat kepada 5 pemenang kuis Edisi I, Januari 2002 yaitu :

1. Muhammad Abdi

Jl. Ratulangi No. 47 E, Makassar
Email : la_abdi@telkom.net

3. Hotel Mariola

Jl. Jend. Sudirman No. 38 B
Tanah Grogot, Kabupaten Pasir

5. Leksip

Email : leksip@samarinda.org

2. Syamyati

Dinas Kehutanan Pasir
Jl. Jend. Sudirman No. 167 B
Tanah Grogot 76211, Kabupaten Pasir

4. Saleh Muhamad

Email : muhamad.saleh@totalfinalelf.com

TirtaPELA

Buletin bulanan (*monthly newsletter*) diterbitkan atas kerjasama CRMP/Proyek Pesisir Kaltim dengan Pusat Penelitian Pengelolaan Sumberdaya Air (PPPSA) Universitas Mulawarman. Penanggung Jawab: Jacobus J. Wenmo dan Tim Komunikasi Proyek Pesisir (Maurice Knight, Stacy Tighe, Adi Wiyana Kun Hidayat, Ahmad Husein, Tammy Carolina) Pemimpin Redaksi: Sigit Hardwinarto Wakil Pemimpin Redaksi: Elisabeth B. Wetik Dewan Redaksi: Agustinus Taufik, Ahmad Syafei Sidik, Niel Makinuddin, M. Yusuf Wahab, Rosmarini, Romif Erwinadi, Surodal, M. Isnaeni, Zulfikar, M. Khasali H, Ar Setiabudi Dharmawan (Alm.), Achmad Setiadi, Ramon, Ari Kristiyani, Eka Sri Utami, M. Farid Fadillah, Agus Hermansyah, Bambang, Jufriansyah, E. Jarot Erlina, Cipto HP. Alamat Redaksi: Jl. R.E. Martadinata No. 03 RT 28 RW 10, Mekarsari, Balikpapan 76121, Kalimantan Timur, Indonesia. Telepon: 0542 731016. Fax: 0542-731858. E-mail: tirtapela@yahoo.com

